

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lembaga Pemerintah Daerah adalah organisasi sektor publik yang mendapatkan kekuasaan dari Pemerintah Pusat guna menata pemerintahan daerah dengan melaksanakan otonomi daerah. Mengurus tatanan pemerintah daerah serta kepentingan rakyat yang sejalan dengan aturan undang – undang adalah wewenang, hak, dan kewajiban suatu daerah dari otonomi daerah. Otonomi daerah mendapatkan wewenang serta kewajiban guna mengelola sumber – sumber keuangan dalam menjadi kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Hadirnya otonomi daerah menjadikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang sudah diatur didalam peraturan daerah dapat dikelola sendiri oleh pemerintah daerah, sehingga masyarakat berharap pemerintah daerah dapat mengelola keuangannya dengan baik dalam upaya mengolah APBD secara transparan, efisien dan akuntabel serta masyarakat mengharapkan pemerintah daerah untuk menjalankan pemerintahan dengan sebaik-baiknya dalam upaya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai wujud bentuk penegakan otonomi daerah.

Upaya pemerintah daerah dalam pelaksanaan tata pemerintahan yang baik dapat diukur dengan capaian kinerja yang dilakukan pemerintah. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana strategi suatu organisasi (Tsauri, 2014). Pemerintah yang memiliki tata kelola yang baik pasti akan memiliki kinerja pemerintahan yang baik dan memiliki kinerja keuangan yang baik juga.

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan (Suryani, 2021). Transparansi dan

akuntabilitas merupakan hal yang sangat penting dalam mewujudkan kinerja keuangan dan tata kelola pemerintahan yang baik. Adanya beberapa masalah penyelewengan dalam proses mengimplementasikan akuntabilitas dan transparansi karena kurangnya suatu pengendalian yang dapat mengawasi seluruh kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga perlu adanya faktor lain yang dapat membantu proses capaian kinerja keuangan yang baik yaitu pengendalian interal (Karim & Mursalim, 2019). Jadi, dapat disimpulkan untuk mencapai kinerja keuangan yang baik harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan memiliki pengendalian internal yang baik serta tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Transparansi artinya semua penyelenggaraan pemerintah harus terbuka kepada masyarakat umum, baik dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan maupun berkaitan dengan suatu keputusan perlu memiliki akses untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan (Nababan et al., 2018). Dengan adanya transparansi keterbukaan informasi yang diberikan secara memadai dan mudah dipahami digunakan sebagai alat untuk evaluasi hasil kinerja dan pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang ada. Apabila transparansi tidak diterapkan dalam suatu pemerintah, maka akan menyebabkan adanya penyalahgunaan sumber daya dan terjadinya penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Jika pemerintah memiliki transparansi yang baik maka kinerja keuangan juga baik pula. Penelitian yang dilakukan oleh Karim & Mursalim (2019) dan Halim (2019) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan.

Selain transparansi, akuntabilitas adalah pertanggungjawaban dari pihak dalam kepada pihak luar ketika menjalankan suatu organisasi sehingga pelaporan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dan pemangku kepentingan atau stakeholder. Akuntabilitas menjadi kewajiban dan tanggungjawab pemerintah untuk mengelola, menyajikan, melaporkan serta menyampaikan segala aktivitas yang dilaksanakan kepada publik (Mardiasmo, 2002). Jika pemerintah dapat meningkatkan akuntabilitas kepada publik maka kinerja keuangan semakin baik. Penelitian yang dilakukan oleh Farhan et al., (2023) dan Suryani (2021) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

Penerapan pengendalian internal harus dilakukan untuk mewujudkan terciptanya kinerja keuangan yang baik, agar dapat memberi keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan tujuan serta dapat tercapainya efektifitas dan efisiensi didalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pemerintah. Pemerintah harus melaksanakan dan meningkatkan pengendalian internal untuk kinerja keuangan yang baik. Penelitian yang dilakukan oleh Angie (2022) dan Syukur et al., (2022) menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

Struktur pemerintah daerah yang mengelola keuangan daerah yaitu Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) adalah salah satu PD (Perangkat Daerah) yang memiliki tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan sebagian kewenangan daerah dibagian keuangan, merumuskan seluruh kebijakan teknis yang ada pada bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yaitu pendapatan, penganggaran, akuntansi, verifikasi, belanja dan aset daerah, serta hal lain yang tertuang pada kebijakan yang diatur Bupati undang – undang pemerintah daerah. Salah satunya BPPKAD Kabupaten Probolinggo harus menerapkan transparansi, akuntabilitas dan pengendalian internal dalam mengelola keuangan yaitu agar pelaksanaan kegiatan terutama pada bagian pengelolaan keuangan dapat dijalankan sesuai dengan tujuan dan rencana serta tercapainya efisiensi dan efektifitas serta terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Hal ini penting dikarenakan saat ini kita sering mendengar kasus dimana penyalahgunaan dana dan isu permasalahan dalam mengelola keuangan yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat.

Berdasarkan Rencana Kerja BPPKAD Kabupaten Probolinggo terdapat beberapa isu-isu permasalahan yaitu dari bidang pendapatan relatif masih rendahnya PAD, serta tidak tercapainya realisasi pendapatan daerah yang sudah ditetapkan. *Roadmap* yang berisi transparansi pengelolaan keuangan belum optimal harusnya sudah dimulai dari tahun 2022 serta perlu adanya data keuangan tiap semester dan dari bidang anggaran terkait transparansi juga belum optimal dalam pengelolaan *website* per bidang. Advokasi dan verifikasi dalam proses menyusun RKA-SKPD dan DPA-SKPD yang masih belum optimal kemudian menyebabkan

sinkronisasi dan konsistensi APBD dengan dokumen perencanaan daerah masih belum tercapai. Hal ini juga didukung dengan temuan BPK yang berhubungan dengan permasalahan aset daerah masih cukup tinggi. Pengelolaan aset yang belum memadai, konsistensi dan komitmen kebijakan pemerintah Kabupaten Probolinggo pada bidang pengelolaan keuangan yang masih rendah, serta minimnya komitmen pimpinan Perangkat Daerah terhadap kebijakan pengelolaan keuangan (Probolinggo, 2022).

Penerapan transparansi, akuntabilitas serta pengendalian internal pada BPKAD Kabupaten Probolinggo masih belum maksimal, hal ini disebabkan adanya transparansi yang belum optimal dikelola perbidang, sedangkan terkait akuntabilitas perlu ditingkatkan lagi dengan adanya PAD yang tak sesuai target. Untuk pengendalian internal dalam melakukan evaluasi sekaligus perbaikan masih longgar terkait dengan isu permasalahan untuk menghindari kejadian tersebut terulang kembali. Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan fenomena di atas, maka penelitian ini berjudul “PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA BPPKAD KABUPATEN PROBOLINGGO.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah transparansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan BPPKAD Kabupaten Probolinggo?
2. Apakah akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan BPPKAD Kabupaten Probolinggo?
3. Apakah pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan BPPKAD Kabupaten Probolinggo?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh transparansi terhadap kinerja keuangan BPPKAD Kabupaten Probolinggo.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja keuangan BPPKAD Kabupaten Probolinggo.
3. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh pengendalian internal terhadap kinerja keuangan BPPKAD Kabupaten Probolinggo.

1.4 Manfaat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan dan manfaat untuk :

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan terkait faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan dan sebagai syarat menyelesaikan Pendidikan di Politeknik Negeri Jember.

2. Bagi BPPKAD

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan masukan dan pertimbangan dalam hal memperbaiki kinerja keuangan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

3. Peneliti Selanjutnya :

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dan juga sebagai referensi tambahan dalam penyusunan judul penelitian yang berkaitan dengan tema dan topik pada penelitian ini.